

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	12
C. TUJUAN PENELITIAN	12
D. MANFAAT PENELITIAN.....	13
E. KEASLIAN PENELITIAN	14
BAB II.....	18
A. Tinjauan Umum Mengenai Sistem Penegakan Hukum Persaingan Usaha	18
1. Pengertian <i>Public Enforcement</i>	18
2. Pengertian <i>Private Enforcement</i>	19
3. Jenis Gugatan Ganti Rugi di Private Enforcement	22
B. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Pengawas Persaingan Usaha Indonesia dan Australia	24

1. Sejarah Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Australia	24
2. Tugas dan Kewenangan Lembaga Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia dan Australia.....	28
BAB III.....	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Jenis Pendekatan	36
C. Sumber Bahan Hukum.....	37
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	38
E. Teknik Analisis Data	39
BAB IV	41
A. Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Konteks Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Korban Praktik Anti Kompetisi....	41
1. Studi Kasus KPPU dalam Konteks Pemenuhan Hak Ganti Rugi Korban Praktik Anti Kompetisi	41
2. Peraturan Hukum Mengenai Penetapan Pembayaran Ganti Rugi dan Kewenangan KPPU dalam Menjatuhkannya Sebagai Salah Satu Bentuk Tindakan Administratif	48
B. Penerapan Private Enforcement dalam Praktik Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Australia	61
1. Ketentuan Umum Mengenai Tahap Litigasi Pada Kasus Hukum Persaingan Usaha di Australia Dalam Kaitanya dengan Pengajuan Gugatan Ganti Rugi.....	61

2. Ketentuan Umum Mengenai Penerapan Private Enforcement di Australia

70

3. Perintah dan Pemulihan yang Dapat Diajukan oleh Korban Praktek Anti Persaingan Usaha Mengacu Pada Hukum Persaingan Usaha Australia.79

C. Peluang Penerapan Private Enforcement Mengacu Pada Kerangka Hukum

Positif yang Berlaku di Indonesia 89

BAB V..... 100

A. Kesimpulan.....100

B. Saran104

DAFTAR PUSTAKA..... 107